

# **LAKIP TAHUN 2022**



**KABUPATEN KONAWA UTARA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dapat tersusun dan disajikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksud sebagai evaluasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, sehingga apa yang akan dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasilguna serta memberikan arahan yang jelas apa yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam Penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara masih jauh dari sempurna untuk itu dimohon masukan kritik dan saran diharapkan demi kesempurnaan dalam penulisannya guna mewujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai lembaga yang Profesional dalam melaksanakan Tugas.

Wanggudu, 31 Desember 2022

Kalak BPBD

Kab. Konawe Utara



**Ns. MUH. AIDIN, S.Kep.,MM**

Nip. 19670505 198903 1 022

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.....	4
D. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) BPBD Kabupaten Konawe Utara.....	4
E. Ruang Lingkup.....	5
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP.....	5
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA.....	6
A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.....	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	6
C. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	11
D. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.....	11
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	17
B. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022.....	19
D. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.....	20
E. Analisis Capaian Kinerja.....	21
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	22
H. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV.....	26
PENUTUP.....	26
A. KESIMPULAN.....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara pemerintahan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa salah satu tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah yaitu dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan dengan pusat dan daerah, maka kewenangan kebijakan pelayanan juga diserahkan kepada daerah.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimana dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa azas-azas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsional dan Azas Akuntabilitas . Dalam hal ini Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan tersebut oleh Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ), maka selain dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan Kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara secara akuntabel sebagai alat pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penulisan / penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 secara umum adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan pengurangan risiko bencana yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis penanggulangan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan mendapat pengakuan dari unsur masyarakat. Selain itu, LKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

LAKIP BPBD Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 ini disusun dengan maksud dan tujuan yang lebih rinci adalah :

1. Menjabarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021–2026 ke dalam rencana program prioritas kegiatan tahunan Perangkat Daerah;
2. Menyelaraskan dan mensinkronkan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021–2026;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah dalam rangka pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 dalam Bidang Kebencanaan;
5. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
6. Tersedianya pedoman penyusunan DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

### **C. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara**

Peraturan Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2010 pada pasal 5 disebutkan bahwa :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasi peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan;
4. Pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan lingkup BPBD;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

### **D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) BPBD Kabupaten Konawe Utara**

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa;
2. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;

4. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

## **E. Ruang Lingkup**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sehingga akan diketahui secara jelas mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dengan indikator yang ada, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pengukurannya kemudian dengan tingkat capaian hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022, lebih banyak bersifat kualitatif.

## **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP**

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara
- D. Struktur Organisasi
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) BPBD Kabupaten Konawe Utara
- F. Ruang Lingkup
- G. Sistematika Penulisan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Strategi dan Arah Kebijakan
- D. Rencana Kinerja tahun 2022
- E. Perjanjian Kinerja

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Kerangka Pengukuran kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
- D. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan tahun ini Dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- E. Analisa capaian Kinerja
- F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- G. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- H. Realisasi Anggaran

### **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

#### A. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara

Dengan memperhatikan Visi Daerah tersebut diatas serta dengan memperhatikan peranan pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara masih tetap mengacu pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 yaitu :

#### ***“Ketangguhan Masyarakat Konawe Utara Dalam Menghadapi Bencana”***

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	INDIKATOR RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks Resiko Bencana

#### B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra melalui Metode Analisis SWOT, yaitu *Strengths* (S), *Weaknesses* (W), *Opportunities* (O), and *Threats* (T). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut,

yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) disajikan pada Tabel 14 sebagai berikut :

Faktor Internal Kekuatan (Strength=S)	Faktor Eksternal Peluang (Opportunities = O)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki aparatur yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.</li> <li>2 Telah memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsipenanggulangan bencana.</li> <li>3 Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana</li> <li>4 Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dana komunikasi melalui HT.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang</li> <li>2 Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya(pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan)</li> <li>3 Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi.</li> <li>4 Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.</li> </ol>
Kelemahan (Weaknesess = W)	Tantangan (Threats = T)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas</li> <li>2 Sarana dan prasarana yang masih belum memadai</li> <li>3 Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional</li> <li>4 Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC</li> <li>5 Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi</li> <li>2 Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Kutai Kartanegara.</li> <li>3 Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana</li> <li>4 Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;</li> <li>5 Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif</li> </ol>

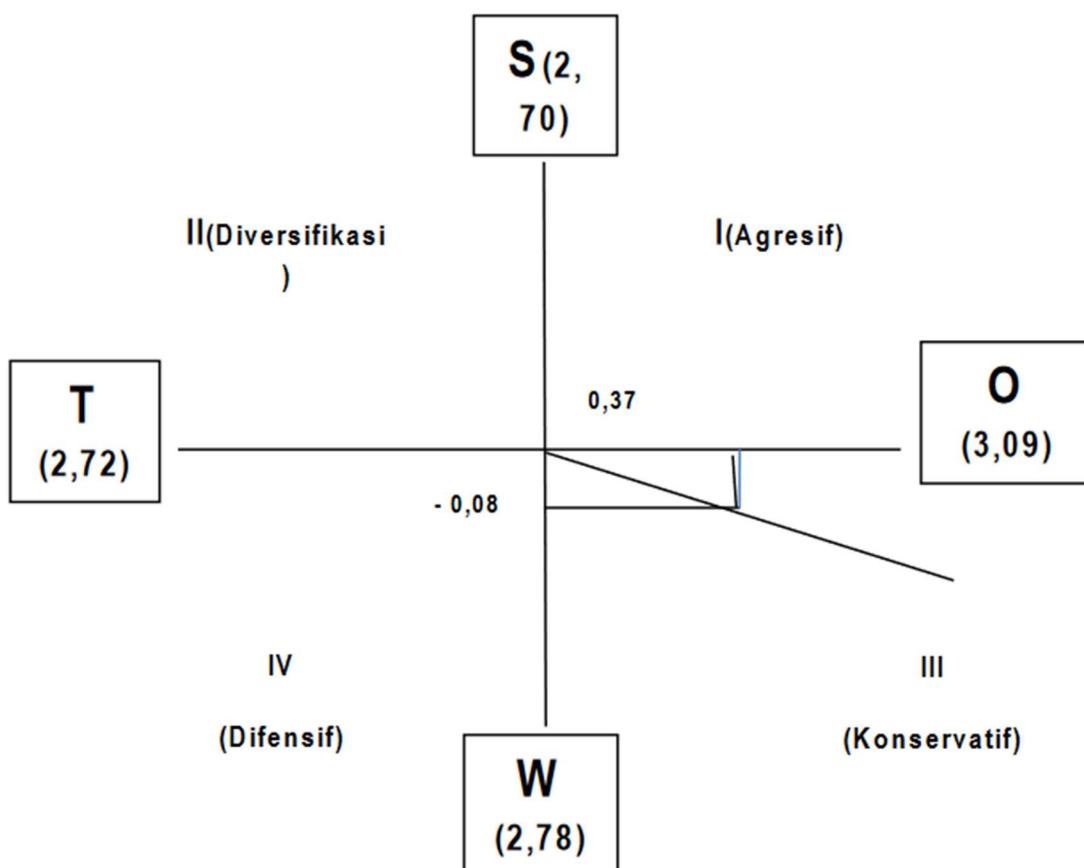
Faktor internal dan eksternal yang telah disajikan pada Tabel 15 selanjutnya diberi bobot dan rating untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor. Setelah diperoleh nilai untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka dilakukan penghitungan matriks internal dan matriks eksternal :

Faktor Internal Kekuatan (Strength=S)		Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Memiliki aparatur yang komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.	25,00%	2,80	0,7
2	Telah memiliki sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas dan fungsipenanggulangan bencana.	25,00%	3,20	0,8
3	Dibeberapa kecamatan memiliki beberapa Pos yang berfungsi sebagai pos penanggulangan bencana	30,00%	2,40	0,72
4	Memiliki sistem informasi pengendalian dan penanggulangan bencana berbasis web, station radio dana komunikasi melalui HT.	20,00%	2,40	0,48
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00%</b>	<b>10,80</b>	<b>2,70</b>
Kelemahan (Weaknesess = W)		Bobot	Rating	Bobot x Rating
1	Kualitas sumberdaya aparatur yang terbatas	25,00%	2,60	0,65
2	Sarana dan prasarana yang masih belum memadai	25,00%	3,20	0,80
3	Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional	15,00%	2,80	0,42
4	Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC	20,00%	2,60	0,52
5	Sistem ketatalaksanaan dalam rangka standarisasi proses penyelenggaraan organisasi belum lengkap	15,00%	2,60	0,39
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00%</b>	<b>13,80</b>	<b>2,78</b>

<b>Faktor Eksternal Peluang (Opportunities = O)</b>		<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Bobot x Rating</b>
1	Sesuai dengan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, bahwa urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar sehingga lebih fokus dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal.	30,00%	3,40	1,02
2	Sinkronisasi dan koordinasi yang lebih optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pendanaanya(pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan Desa/kelurahan)	25,00%	3,20	0,8
3	Perkembangan teknologi informasi sudah sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan monitoring mulai dari proses pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi sertarekonstruksi.	20,00%	2,60	0,52
4	Partisipasi aktif dari organisasi politik, masyarakat, dunia usaha, LSM dan pelajar dan Mahasiswa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	25,00%	3,00	0,75
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00%</b>	<b>8,80</b>	<b>2,07</b>
<b>Tantangan (Threats = T)</b>		<b>Bobot</b>	<b>Rating</b>	<b>Bobot x Rating</b>
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana;	20,00%	2,40	0,48
2	Luasnya wilayah, Topografi, Geografis dan Demografi dari Kabupaten Konawe Utara .	30,00%	3,20	0,96
3	Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana	20,00%	2,80	0,56
4	Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana;	15,00%	2,20	0,33
5	Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif	15,00%	2,60	0,39
<b>JUMLAH</b>		<b>100,00%</b>	<b>13,20</b>	<b>2,72</b>
		S-W	-3,00	-0,08
		O-T	4,40	0,65

Nilai matriks evaluasi internal adalah Total Kekuatan (S) - Total Kelemahan (W) = 2,70 – 2,78 = - 0,08. Sementara itu, Nilai matriks evaluasi eksternal adalah Total Peluang (O) - Total Ancaman (T) = 3,09-2,72 = 0,37. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka profil strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan sebagai berikut:

Gambar. 3. Diagram SWOT



Adapun makna untuk masing-masing kuadran pada gambar diatas, dijelaskan sebagai berikut:

Kuadran I: Merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran II: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara diversifikasi.

Kuadran III: Memiliki peluang yang sangat besar tetapi di lain pihak menghadapi berbagai kelemahan internal. Fokus strategi meminimalkan masalah- masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran IV: Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan karena menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, selanjutnya dirumuskan strategi yang dikembangkan yaitu strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W-O).

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan kebakaran dan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Alternatif strategi yang disajikan diatas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara 2021 - 2026. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel 15 : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Konawe Utara

Visi : Konawe Utara Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing (KONASARA II)				
Misi Ke 5 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana				
NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Kajian Resiko Bencana 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
		Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Peningkatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 4 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 5 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 9 Penyusunan Rencana Kontijensi 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	13 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 14 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 15 enyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 16 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Optimalisasi Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	17 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 18 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 19 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan 20 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 21 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi terhadap penanggulangan bencana dan kebakaran dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

### C. Rencana Kinerja Tahun 2022

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan, adalah merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah (5 tahunan). Tabel di bawah ini berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran dalam 5 tahun periode RPJMD. Setiap Sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur. Secara konkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Konawe Utara.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	TARGET
Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
	Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,45
	Jumlah Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana Yang Dilaksanakan	4 Kegiatan
	Persentase Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana	20 Kawasan

### D. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dalam jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis, maka disusunlah Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 yang merupakan perjanjian kinerja antara pimpinan (Bupati) dengan bawahan (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ).

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022 merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana di dalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

**Tabel I. Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,45
		Jumlah Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana Yang Dilaksanakan	4 Kegiatan
		Persentase Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana	20 Kawasan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.199.060.643,-	DAU-DBH
2.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 106.683.853.386,-	DAU-DBH
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp. 109.882.914.029,-</b>	

TABEL RENCANA AKSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Penetapan (Target Per Triwulan)				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Pentahapan												Pengerangan	
					Tw1	Tw2	Tw3	Tw4					B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	B.8	B.9	B.10	B.11	B.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	- Jumlah Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana Yang Dilaksanakan - Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana	%	100%	25%	25%	25%	25%	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14.686.658.804,00
			%	100%	25%	25%	25%	25%	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	14.686.658.804,00
			%	100%	25%	25%	25%	25%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	3.597.131.525,00
			%	100%	25%	25%	25%	25%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dok Perencanaan & Penganggaran	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	54.834.410,00
			%	100%	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dok SAKIP	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23.749.430,00
			%	100%	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dok RKA	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.688.000,00
			%	100%	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase DPA	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.200.000,00
			%	100%	25%	25%	25%	25%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase LAKIP	%	100%	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	21.196.980,00







## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbentuk kegiatan Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022.

Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam indikator dari Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 85% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan sangat berhasil.

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara melaksanakan 2 (dua) Program dan 12 (duabelas ) Kegiatan dan 25 (duapuluh lima) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022. Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

Laporan ini merupakan capaian keluaran (output) dari kegiatan dan capaian hasil (outcome) dari program yang indikator hasilnya merupakan indikator utama dari sasaran program tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara seperti tertuang dalam perencanaan strategik.

Dalam LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara menyajikan capaian kinerja setiap sasaran dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja sasaran dengan realisasinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara diuraikan sebagai berikut :

SASARAN RPJMD	INDIKATOR RPJMD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR STRATEGIS	FORMULA
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Indeks Resiko Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Penguatan Kawasan Rawan Bencana :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Penguatan Kawasan} \times 100\%}{\text{Jumlah Daerah Rawan Bencana}}</math></li> <li>- <b>Pembentukan Desa Tangguh Bencana :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Desa Tangguh Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Desa Rawan Bencana}}</math></li> <li>- <b>Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana:</b> <math>\frac{\text{Jumlah Sosialisasi KIE Per Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Masyarakat Mengikuti Sosialisasi}}</math></li> <li>- <b>Penanganan Bencana :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Tertangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Korban Bencana}}</math></li> <li>- <b>Penyediaan Peralatan PB :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Peralatan PB Kondisi Baik} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Peralatan PB}}</math></li> <li>- <b>Penyediaan Logistik Korban Bencana :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Penyediaan Logistik} \times 100\%}{\text{Jumlah Korban Bencana}}</math></li> <li>- <b>Rehabilitasi Pasca Bencana :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Pemulihan Ekonomi Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Terdampak Ekonomi Pasca Bencana}}</math></li> <li>- <b>Rekonstruksi Pasca Bencana :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Pemulihan Sarpras} \times 100\%}{\text{Jumlah Sarpras Terdampak}}</math></li> </ul>

### C. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	
			TARGET	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
		Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,45	0,45
		Jumlah Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana Yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	0 Kegiatan
		Persentase Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana	20 Kawasan	111 Kawasan

**D. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.**

Dari perbandingan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, maka target capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara telah tercapai sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			CAPAIAN KINERJA (%)
			TAHUN 2021	TARGET RPJMD	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%

		Meningkatnya Indikator Ketahanan Daerah Terhadap Bencana		0,45	100%	100%
		Jumlah Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana Yang Dilaksanakan		4 Kegiatan	0 %	0 %
		Persentase Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana		20 Kawasan	111 Kawasan	500%

#### E. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum untuk tahun 2022 ini Badan penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Konawe Utara dan dari hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2022 telah tercapai. Dari pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan secara fisik dan dari realisasi keuangan diperoleh kategori capaian 34,97 % (Kurang Baik), dan apabila dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada penjabaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2021- 2026 dan Renstra SKPD untuk capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara adalah 60 % dengan kategori baik.

#### F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2022 secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, namun beberapa masalah, antara lain :

*LAKIP BPBD T.A 2022*

1. Pengelolaan administrasi penyusunan LAKIP instansi masih belum sesuai harapan.
2. Tingkat Kualitas SDM aparatur masih sangat terbatas.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan sering tidak tepat dengan waktu yang telah ditetapkan dikarenakan dana yang belum turun.
4. Aturan/ petunjuk operasional sering berubah-ubah.

Berdasarkan identifikasi diatas, maka strategi yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumberdaya aparatur yang tersedia untuk melaksanakan penyusunan administrasi LAKIP.
2. Penambahan SDM yang profesional dan mengirimkan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Ketepatan waktu turunnya anggaran harus sesuai dengan waktu kegiatan
4. Perlunya kesepahaman dan komitmen segenap unsur terkait baik organisasi maupun individu yang terlibat untuk suksesnya penyelenggaraan dan tercapainya target kinerja.

**G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk hasil yang akan dicapai, dapat dijelaskan seperti tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			CAPAIAN KINERJA (%)
			TAHUN 2021	TARGET RPJMD	REALISASI (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen bencana	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	100%
		Meningkatnya Indikator		0,45	100%	100%

	Ketahanan Daerah Terhadap Bencana				
	Jumlah Sosialisasi KIE Per Jenis Bencana Yang Dilaksanakan		4 Kegiatan	0 %	0 %
	Persentase Penguatan Kapasitas Kawasan Rawan Bencana		20 Kawasan	111 Kawasan	500%

#### H. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2022 memperoleh dana sebesar Rp. 141.779.045.995,30 dengan rincian belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.288.999.554,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.252.796.483,00 atau 97,19 %.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.007.475.250,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.991.855.849,00 atau 28,42 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 133.482.571.191,30 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.334.390.250,00 atau 34,71 %.

Kendala atas Prosentase Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022. Realisasi Keuangan yang terserap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar 34,97 % dengan rincian sebagai berikut :

Untuk lebih jelasnya serapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara melalui APBD Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Bagi Hasil (DBH) tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Realisasi Fisik dan Keuangan secara rinci untuk setiap program dan per kegiatan.

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
 Bulan : Desember 2022

No.	SKPD	URAIAN	PAGU	REALISASI FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN	SISA PAGU	CAPAIAN (%)
1.	BPBD	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.582.450,00	100	35.582.000,00	450,00	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.288.999.554,00	100	1.252.796.483,00	36.203.071,00	97,19
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.200.000,00	100	80.200.000,00	00	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.573.228.300,00	100	1.179.505.361,00	393.722.939,00	74,97
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.102.156,48	100	250.600.000,00	24.502.156,48	91,09
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.789.400,00	100	425.321.515,00	39.467.885,0	91,51
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.751.300,00	100	205.600.973,00	72.150.327,00	74,02
2	BPBD	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>					

		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	121.160.000,00	100	20.852.000,00	100.308.000,00	17,21
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	71.788.415.762,82	100	40.270.030.250,00	31.518.385.512,82	56,10
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	227.213.000,00	100	211.351.000,00	15.862.000,00	93,02
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	65.646.604.072,00	100	5.647.203.000,00	59.999.401.072,00	8,60

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Utara tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2022 telah melaksanakan 2 (dua) program 12 (duabelas) kegiatan dan 25 (duapuluh lima) sub kegiatan . Anggaran Kegiatan tersebut yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Konawe Utara, dimana sebagian besar tingkat capaian kinerja atas program dan kegiatan berada pada tingkat realisasi 34,97 % atau bisa dikategorikan kurang berhasil sementara kalau dilihat dari serapan anggaran Tahun 2021 berada pada posisi 96,35% dengan kategori capaian sangat berhasil.

Dengan tersusunnya LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Wanggudu, 31 Desember 2022

Kalak BPBD

Kab. Konawe Utara



**Ns. MUH. AIDIN, S.Kep.,MM**

Nip. 19670505 198903 1 022